

Melawan Intoleransi Melalui Nilai Sila ke-3 Pancasila Studi Kasus: Pembakaran Gereja di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2015

¹Bagas Andika Pratama, ²Clara Velisya Purwitasari, ³Nur Aini Jannah, ⁴Ravenska Dyah
Nur Fayza, ⁵Septiana Rizki Bariroh Al Matna

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 10 Malang, Jawa Timur, 65152, Indonesia
e-mail: Bagas.andika.2404216@students.um.ac.id

Abstrak

Intoleransi merupakan sikap ketidaksediaan atau ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk menerima, menghormati, atau menghargai perbedaan pendapat, keyakinan, atau perilaku dari orang atau kelompok lain. Kasus Intoleransi yang diangkat dalam artikel ini yaitu Kasus Pembakaran Gereja Aceh Singkil tahun 2015. Artikel ini mengeksplorasi penerapan nilai-nilai Sila ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, dalam konteks melawan intoleransi, dengan fokus pada studi kasus pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2015. Konflik Aceh Singkil disebut sebagai potret buruk intoleransi yang ada di Indonesia, ditengah menjamurnya kontroversi yang terobsesi melakukan politik penyeragaman atas nama mayoritas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian yang tepat yang harus dilakukan untuk menyelesaikan konflik pembakaran gereja Aceh Singkil melalui peran nilai-nilai sila ke 3 Pancasila. Konflik ini sangat menarik dan perlu dikaji lebih lanjut mengenai permasalahan intoleransi beragama ditengah penduduk yang lebih dominan mayoritas. Metode yang digunakan yaitu melalui pendekatan kualitatif dengan menganalisis berbagai sumber literatur, artikel dan analisis data. Hasil yang ditunjukkan setelah penelitian ini dilakukan adalah bahwa kasus intoleransi pembakaran gereja di Aceh Singkil dapat diselesaikan dengan pendidikan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan agama serta dialog antar tokoh-tokoh agama.

Kata kunci— Intoleransi; Intoleransi; Pancasila; Persatuan

Abstract

Intolerance is the unwillingness or inability of an individual or group to accept, respect, or appreciate different opinions, beliefs, or behaviors of other individuals or groups. The case of intolerance addressed in this article is the 2015 church burning in Aceh Singkil. This article explores the application of the values of the 3rd Principle of Pancasila, namely the Unity of Indonesia, in the context of combating intolerance, focusing on the case study of the church burning in Aceh Singkil in 2015. The Singkil conflict is described as a grim portrait of intolerance in Indonesia, amid the proliferation of controversies obsessed with enforcing uniformity in the name of the majority. The aim of this research is to determine the appropriate resolution that should be undertaken to resolve the church burning conflict in Aceh Singkil through the role of the values of the 3rd Principle of Pancasila. This conflict is highly significant and warrants further study on the issue of religious intolerance in a predominantly majoritarian community. The method used is a qualitative approach by analyzing various literature sources, articles, and data analysis. The results indicated that the case of intolerance, the church burning in Aceh Singkil, can be resolved through interfaith dialogue.

Keywords— Intolerance; Pancasila; Unity

PENDAHULUAN

Intoleransi merupakan salah satu tantangan sosial yang signifikan dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Berbagai kasus intoleransi, terutama yang berkaitan dengan agama, ras, dan etnis, sering kali mencerminkan ketidakmampuan sebagian individu atau kelompok untuk menerima dan menghormati perbedaan. Menurut ahli sosiologi, intoleransi dapat diartikan sebagai sikap tidak mau menerima atau menghormati keyakinan, pandangan, atau perilaku yang berbeda dari kelompok atau individu lain. Misalnya, Gordon Allport, seorang psikolog sosial ternama, mendefinisikan intoleransi sebagai "keengganan untuk memberikan kebebasan kepada orang lain dalam hal keyakinan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau keyakinan yang dianut." Allport menekankan bahwa intoleransi seringkali muncul dari prasangka yang mendalam dan ketidakmampuan untuk melihat nilai dalam keberagaman. Intoleransi dapat dikaitkan dengan nilai sila ke 3 Pancasila.

Sila Ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," adalah prinsip yang sangat penting dalam upaya mengatasi masalah intoleransi di Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa yang ada di Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda, kita tetap satu bangsa yang harus hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Dengan menerapkan nilai-nilai persatuan, kita dapat mendorong sikap toleransi dan menghormati hak asasi manusia. Pendidikan yang menginternalisasi nilai-nilai Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk generasi yang menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi persatuan. Selain itu, dialog antarumat beragama yang berkelanjutan dapat membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka. Kebijakan publik yang inklusif dan adil juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

Jonathan Haidt, Psikolog Sosial Amerika Serikat menyatakan bahwa moralitas manusia didasarkan pada enam pondasi dasar, yaitu kepedulian, keadilan, loyalitas, otoritas, kesucian, dan kebebasan. Dia berpendapat bahwa berbagai kelompok sosial, termasuk masyarakat Muslim di Indonesia, mungkin mengutamakan pondasi moral tertentu lebih dari yang lainnya, yang dapat memengaruhi bagaimana mereka merespons kelompok agama yang berbeda.

Kasus-kasus intoleransi tidak hanya mengancam harmoni sosial, tetapi juga merusak tatanan kehidupan yang adil dan inklusif. Salah satu contoh nyata dari intoleransi agama di Indonesia adalah peristiwa pembakaran gereja di Kabupaten Singkil, Aceh pada tahun 2015. Peristiwa ini menyoroti ketegangan antar kelompok agama yang berbeda, khususnya di wilayah yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Penduduk Kristen di Singkil menghadapi berbagai kesulitan dalam mendapatkan izin untuk mendirikan tempat ibadah. Ketegangan ini memuncak ketika beberapa gereja yang tidak memiliki izin resmi dibongkar dan dibakar oleh sekelompok orang. Insiden ini tidak hanya mencerminkan kurangnya toleransi antar umat beragama, tetapi juga menunjukkan kelemahan dalam penerapan hukum dan kebijakan yang inklusif.

Konflik ini tidak hanya menunjukkan kekurangan dalam hal toleransi antarumat beragama, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam penerapan kebijakan yang adil dan inklusif. Kejadian di Singkil menjadi potret buruk dari situasi intoleransi yang ada di Indonesia dan memicu reaksi dari berbagai pihak yang menuntut tindakan tegas dari pemerintah untuk mencegah terulangnya kejadian serupa di masa depan.

Sila Ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia," memiliki kaitan erat dengan upaya mengatasi kasus intoleransi, seperti yang terjadi pada pembakaran gereja di Aceh Singkil pada tahun 2015. Sila ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman budaya, agama, etnis, dan bahasa yang ada di Indonesia. Prinsip ini mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki perbedaan, kita tetap satu bangsa yang harus hidup berdampingan dengan saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

Dalam konteks kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil, Sila Ketiga Pancasila menggarisbawahi perlunya menghormati hak setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Permasalahan yang muncul akibat penolakan terhadap pendirian gereja dan tindakan kekerasan yang menyertainya menunjukkan kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai persatuan. Jika nilai-nilai Sila Ketiga, seperti toleransi, saling menghormati, dan kebersamaan, diterapkan dengan baik, konflik seperti ini dapat

dihindari. Selain itu, Sila Ketiga juga mendorong adanya dialog antarumat beragama untuk membangun saling pengertian dan mengurangi prasangka. Dialog yang berkelanjutan dan inklusif dapat membantu meredakan ketegangan dan menciptakan solusi yang adil bagi semua pihak. Kebijakan publik yang inklusif dan adil, yang mendukung hak-hak semua umat beragama tanpa diskriminasi, juga penting dalam menciptakan persatuan yang sesungguhnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apa penyelesaian yang tepat untuk melawan kasus intoleransi pada pembakaran gereja Aceh Singkil tanpa melakukan diskriminasi pada kaum minoritas. Dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif melalui pengkajian dari berbagai sumber literatur dan artikel diharapkan bisa memberikan gambaran bagaimana solusi tepat yang harus dilakukan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Sila ke-3.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Denzin dan Lincoln (2005), penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk menginterpretasikan fenomena yang terjadi dalam konteks alamiah. Penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam terhadap perilaku manusia dan alasan di balik perilaku tersebut. Menurut Michael Quinn Patton (2002), penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap pengalaman manusia dan proses yang terjadi dalam konteks tertentu. Penelitian ini lebih mengutamakan data yang bersifat naratif dan deskriptif.

Analisis artikel bersumber pada data sekunder yang diperoleh melalui literatur jurnal dan artikel dengan menggunakan desain studi kasus. Data dianalisis melalui studi kasus yang bertujuan memahami fenomena atau masalah dalam konteks yang sangat spesifik dan mendetail. Dalam konteks penelitian tentang intoleransi, studi kasus dapat membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peristiwa tertentu di suatu lokasi. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan teori atau model yang dapat diterapkan pada kasus-kasus serupa di masa depan. Data yang digunakan berasal dari Perbandingan dari setiap artikel yang di kaji lebih mendalam dan nantinya menemukan jawaban atas tujuan dari penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel ini membahas penerapan nilai sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia, sebagai upaya untuk melawan intoleransi di Indonesia dengan studi kasus peristiwa pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2015. Peristiwa ini menunjukkan bagaimana ketegangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan agama dapat memicu tindakan kekerasan yang merusak persatuan bangsa. Walaupun Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut prinsip keberagaman, kenyataannya perbedaan agama, budaya, dan etnis sering kali menjadi sumber konflik yang mengancam persatuan. Oleh karena itu, penerapan nilai Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang hidup harmonis meski dalam keberagaman. Secara umum, sila ketiga Pancasila mengajarkan pentingnya persatuan yang seharusnya diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Menurut Siti Aminah (2017), pemahaman yang kurang mengenai nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, menyebabkan adanya sikap sektarian yang mudah dipicu oleh perbedaan agama dan budaya. Konsep Persatuan Indonesia tidak hanya berbicara tentang penyatuan berbagai elemen bangsa, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat saling menghargai perbedaan dan bekerja bersama menuju tujuan yang sama, yaitu kehidupan yang damai dan sejahtera. Pada konteks peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil, intoleransi agama menjadi masalah serius yang harus diatasi dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019), dijelaskan bahwa salah satu langkah utama dalam mengatasi intoleransi adalah melalui pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga. Pendidikan Pancasila yang mengajarkan tentang persatuan dan toleransi menjadi kunci untuk membentuk karakter bangsa yang mengedepankan keharmonisan antar individu, tanpa terjebak dalam perbedaan. Dewi mengemukakan bahwa pendidikan yang menyeluruh tentang Pancasila sejak dini dapat mengurangi potensi ketegangan sosial yang disebabkan oleh perbedaan, termasuk perbedaan agama yang

kerap memicu kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila harus lebih ditingkatkan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Terkait dengan temuan ini, teori integrasi sosial dari Émile Durkheim menjadi relevan untuk memahami bagaimana masyarakat Indonesia yang plural dapat membangun persatuan meskipun ada perbedaan yang signifikan. Durkheim berpendapat bahwa masyarakat yang berhasil menciptakan integrasi sosial yang kuat akan mampu mengatasi perbedaan dengan cara yang lebih damai. Konsep integrasi sosial ini penting karena menyiratkan bahwa meskipun ada ketegangan antar kelompok, integrasi sosial yang kokoh akan mencegah terjadinya konflik terbuka. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keberagaman agama, budaya, dan etnis, konsep integrasi sosial ini sangat diperlukan untuk menjaga agar perbedaan tidak menjadi pemicu perpecahan.

Dalam kaitannya dengan peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil, kita dapat melihat bahwa ketegangan yang terjadi merupakan cerminan dari lemahnya integrasi sosial yang ada dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu menerima perbedaan dan merasa terancam oleh perbedaan agama cenderung menjadi lebih rentan terhadap provokasi yang dapat memicu tindakan kekerasan. Oleh karena itu, pendidikan yang menanamkan nilai-nilai Persatuan Indonesia sangat penting untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih terbuka terhadap keberagaman dan mampu hidup berdampingan dengan perbedaan. Seiring dengan itu, integrasi sosial yang baik dapat tercipta jika ada kesadaran kolektif untuk menjaga persatuan meskipun ada ketegangan. Selain itu, artikel ini juga menggali lebih dalam tentang pentingnya penguatan karakter bangsa sebagai salah satu langkah dalam melawan intoleransi. Pendidikan karakter berbasis nilai Pancasila diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya hidup bersama dalam keragaman. Hal ini sangat penting karena generasi muda adalah penerus bangsa yang akan membentuk wajah Indonesia di masa depan. Dengan memperkenalkan nilai-nilai Pancasila yang mengutamakan persatuan dan saling menghargai, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang membawa Indonesia menuju masyarakat yang lebih toleran dan harmonis. Menurut Sari (2018), pendidikan karakter yang berbasis pada nilai Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua lapisan masyarakat. Tidak hanya di sekolah, tetapi juga di masyarakat secara umum, nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat. Hal ini sesuai dengan pandangan dari sejumlah ahli bahwa pendidikan formal dan non-formal harus saling mendukung dalam membentuk karakter bangsa. Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan di luar sekolah seperti seminar, workshop, dan kegiatan sosial yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi sarana yang efektif untuk menguatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya persatuan dalam keberagaman. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis Pancasila harus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah juga memiliki peran yang sangat besar dalam memperkuat pendidikan Pancasila. Selain memperkuat kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah, pemerintah harus aktif dalam mengembangkan program-program yang dapat menanamkan nilai Persatuan Indonesia kepada masyarakat. Menurut penelitian oleh Rahayu (2017), kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan program-program berbasis Pancasila dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Program-program ini tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga harus diikuti dengan tindakan nyata yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, masyarakat yang sudah memahami nilai-nilai Pancasila akan lebih mampu menjaga persatuan dan mencegah terjadinya intoleransi.

Dalam perspektif yang lebih luas, penerapan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat tidak hanya dapat mengurangi konflik sosial, tetapi juga dapat menciptakan suatu tatanan sosial yang lebih harmonis dan adil. Hal ini penting karena Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dirancang untuk menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara yang mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan persatuan. Oleh karena itu, penerapan nilai Pancasila harus menjadi bagian dari setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga kehidupan sosial dan politik. Jika nilai Persatuan Indonesia diterapkan dengan baik, maka Indonesia akan mampu menghadapi tantangan keberagaman dan intoleransi dengan lebih baik. Dalam kaitannya dengan peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil, kita dapat melihat bahwa intoleransi yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh segelintir orang ini tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga merusak tatanan sosial dan keharmonisan yang selama ini terjalin di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa dengan memperkuat pendidikan tentang Pancasila dan memupuk kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dalam keragaman.

Peristiwa pembakaran gereja di Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2015 mencerminkan bagaimana intoleransi agama dapat berkembang dan mengancam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang seharusnya dihargai dalam kerangka keberagaman dan persatuan. Kasus ini berawal dari ketegangan antar kelompok agama terkait dengan izin pendirian rumah ibadah yang kemudian berkembang menjadi aksi kekerasan, di mana beberapa gereja dibakar oleh sekelompok orang. Meskipun awalnya bersifat administratif, masalah ini menajamkan ketegangan sosial yang sudah ada di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengakui keberagaman agama sebagai bagian dari identitas bangsa, intoleransi tetap menjadi ancaman serius yang harus dihadapi bersama. Dalam konteks ini, sila ketiga Pancasila, yaitu "Persatuan Indonesia", menjadi sangat relevan. Menurut Siti Aminah (2017), nilai ini harus menjadi landasan dalam merawat hubungan antar kelompok agama dan etnis yang berbeda. Sebagaimana diungkapkan oleh Arifin (2020), Pancasila mengajarkan kita bahwa meskipun berbeda dalam agama, budaya, dan suku, kita tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Oleh karena itu, tindakan intoleransi seperti yang terjadi dalam pembakaran gereja ini seharusnya menjadi pengingat bahwa persatuan Indonesia perlu dijaga dengan lebih serius melalui pendidikan dan penguatan nilai-nilai kebangsaan.

Penyebab utama dari peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil ini, menurut penelitian Pertiwi (2018), adalah ketidakpahaman sebagian masyarakat tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Pandangan sempit tentang agama dan identitas kelompok masing-masing menjadi faktor yang mendorong terjadinya aksi kekerasan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Zainuddin (2019), penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai persatuan, salah satunya melalui pendidikan Pancasila yang mengajarkan bagaimana menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, pembakaran gereja ini menunjukkan betapa pentingnya upaya untuk menginternalisasi nilai Persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Arifin (2020), salah satu langkah untuk mengatasi intoleransi adalah dengan memfokuskan pendidikan pada pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga. Hal ini dapat dimulai sejak usia dini, baik di sekolah maupun dalam lingkungan keluarga. Pendidikan berbasis Pancasila diharapkan mampu menumbuhkan sikap saling menghargai antar umat beragama, serta membentuk karakter yang menghormati perbedaan. Selain itu, pendekatan ini juga diharapkan dapat mencegah penyebaran radikalisme yang lebih lanjut, seperti yang dilihat dalam peristiwa di Aceh Singkil.

Kehidupan berdampingan dalam keberagaman, seperti yang diajarkan oleh sila ketiga Pancasila, dapat dicapai jika setiap individu dan kelompok memahami bahwa perbedaan bukanlah halangan untuk hidup rukun. Masyarakat yang terbuka terhadap perbedaan dan mengedepankan kepentingan bersama adalah masyarakat yang dapat menjaga persatuan. Dalam pandangan ini, keberagaman tidak lagi dianggap sebagai sumber konflik, tetapi sebagai kekuatan yang memperkaya kehidupan sosial masyarakat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Hasan (2020), yang menyatakan bahwa radikalisme dapat berkembang apabila tidak ada pemahaman yang benar tentang pentingnya persatuan dan toleransi. Pendidikan berbasis Pancasila yang mengutamakan nilai Persatuan Indonesia sangat diperlukan untuk membentuk sikap mental masyarakat agar lebih terbuka dan menerima perbedaan. Zainuddin (2019) juga menekankan pentingnya pendidikan Pancasila yang dapat mendorong sikap inklusif di kalangan generasi muda. Sebagai contoh, dalam kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil, pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman dan toleransi dapat membantu mencegah munculnya ketegangan yang berujung pada kekerasan. Oleh karena itu, penerapan pendidikan ini harus lebih intensif dan melibatkan semua elemen masyarakat, baik pemerintah, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa kasus seperti pembakaran gereja di Aceh Singkil sering kali dipicu oleh ketidakmampuan sebagian masyarakat dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Pandangan sempit mengenai agama dan kepercayaan sering kali mengarah pada perasaan superioritas dan ketidakmampuan untuk menghargai kelompok lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Pertiwi (2018), penyelesaian konflik yang lebih efektif memerlukan pendekatan yang mengutamakan dialog antar kelompok, bukan kekerasan. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila menjadi sangat penting untuk mencegah munculnya radikalisme dan intoleransi. Dalam hal ini, pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam menangani peristiwa intoleransi seperti pembakaran gereja ini. Pemerintah harus aktif dalam menyosialisasikan pentingnya toleransi melalui berbagai program yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan

oleh Arifin (2020), pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat dengan melibatkan berbagai sektor kehidupan, seperti keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan. Selain itu, aparat hukum juga harus tegas dalam menindak segala bentuk kekerasan yang mengarah pada intoleransi. Tokoh agama juga memiliki peran yang tak kalah penting dalam mengatasi persoalan intoleransi. Tokoh agama, sebagai figur yang dihormati oleh banyak masyarakat, dapat memberikan pencerahan kepada umat tentang pentingnya menjaga kedamaian dan toleransi antar kelompok agama. Menurut Siti Aminah (2017), tokoh agama seharusnya tidak hanya menyampaikan pesan-pesan keagamaan, tetapi juga harus aktif dalam mengedukasi umat tentang nilai-nilai persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Dalam konteks pembakaran gereja di Aceh Singkil, peran tokoh agama yang mampu mendamaikan perbedaan akan sangat membantu dalam mencegah terjadinya kekerasan. Kesimpulannya, peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil menjadi bukti bahwa meskipun Indonesia mengakui keberagaman agama, intoleransi tetap menjadi masalah yang perlu diatasi. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, penguatan peran pemerintah, serta keterlibatan tokoh agama dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman adalah langkah-langkah yang perlu ditempuh. Dengan cara ini, kita berharap Indonesia dapat terus menjaga dan memperkuat persatuan, serta menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan inklusif, sesuai dengan tujuan bangsa yang tercermin dalam sila ketiga Pancasila.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Peristiwa pembakaran gereja di Aceh Singkil pada tahun 2015 mencerminkan tantangan serius dalam menjaga keberagaman dan persatuan di Indonesia. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketegangan sosial berbasis agama dapat berkembang menjadi aksi kekerasan yang merusak tatanan sosial. Kasus ini memberikan pelajaran penting tentang perlunya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, sebagai landasan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam keberagaman. Pentingnya Nilai Persatuan Indonesia Sila ketiga Pancasila mengajarkan bahwa perbedaan agama, budaya, dan etnis bukanlah penghalang untuk hidup bersama. Namun, lemahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila yang sering kali menyebabkan munculnya sikap sektarian dan intoleransi. Pemahaman yang mendalam tentang nilai persatuan menjadi kunci untuk mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial. Pendidikan Berbasis Pancasila sebagai Solusi Pendidikan yang berbasis nilai-nilai Pancasila sangat penting untuk membangun karakter bangsa yang toleran. Pendidikan sejak dini yang menanamkan nilai persatuan dan toleransi dapat mengurangi potensi konflik berbasis perbedaan. Pendidikan formal dan non-formal harus saling melengkapi dalam menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan. Langkah ini juga relevan dengan teori integrasi sosial dari Émile Durkheim, yang menekankan pentingnya solidaritas dalam masyarakat plural. Peran Pemerintah dan Tokoh Masyarakat Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan program-program berbasis Pancasila yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya persatuan. Selain itu, tokoh agama sebagai panutan masyarakat juga berperan penting dalam menyampaikan pesan toleransi dan menghargai perbedaan. Kombinasi peran pemerintah, tokoh agama, dan pendidikan dapat menjadi upaya komprehensif untuk melawan intoleransi. Mencegah Konflik melalui Dialog dan Penegakan Hukum Penyelesaian konflik berbasis dialog antar kelompok, lebih efektif dibandingkan kekerasan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan intoleransi juga diperlukan untuk memberikan efek jera dan mencegah peristiwa serupa terulang. Membangun Kesadaran Generasi Muda Generasi muda sebagai penerus bangsa perlu dibekali pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Pancasila. Pendidikan karakter berbasis Pancasila harus menjadi prioritas untuk menciptakan generasi yang inklusif, menghargai perbedaan, dan mampu menjaga persatuan. Dengan itu penerapan nilai sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat diperlukan untuk mengatasi intoleransi yang sering kali menjadi ancaman serius bagi persatuan bangsa. Kasus pembakaran gereja di Aceh Singkil menegaskan bahwa tanpa pemahaman yang mendalam tentang pentingnya persatuan, perbedaan dapat dengan mudah memicu konflik. Pendidikan berbasis Pancasila, keterlibatan pemerintah, tokoh masyarakat, serta pendekatan dialogis menjadi langkah konkret untuk mencegah konflik dan menciptakan tatanan sosial yang harmonis. Dengan memperkuat nilai persatuan dan menghargai keberagaman, Indonesia dapat terus menjaga identitasnya sebagai bangsa yang plural dan toleran.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, C., & Ulinnuha, R. (2022). Pengimplementasi Teologi Sosial dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Masyarakat Aceh. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(2), 343-353.
- Mayasaroh, K. (2020). Toleransi Strategi Dalam Membangun Kerukunan Antarumat Beragama Di Indonesia. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 77-88.
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Pancasila sebagai landasan visional bagi spiritualitas kehidupan bangsa Indonesia dalam menangani intoleransi. *Integritas: Jurnal Teologi*, 2(1), 35-48.
- Amry, T. R., Pencawan, A. P., Nasution, D. A., Sipahutar, I. Z., Tarigan, M. F. B., Damanik, N. G., & Manik, S. G. (2023). Pancasila Sebagai Landasan Penanggulangan Intoleransi Antar Umat Beragama. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 21819-21824.
- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Implementasi nilai Pancasila dalam menangani intoleransi di Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 172-189.
- Tlonaen, N. M., & Saingo, Y. A. (2023). Peran Ideologi Pancasila Dalam Pembentukan Perilaku Anti Ekstremisme Agama. *Jurnal Multidisiplin West Science*, 2(12), 1040-1050
- Japar, M., Irawaty, I., & Fadhillah, D. N. (2019). Peran Pelatihan Penguatan Toleransi Sosial Dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 29(2), 94-104.